

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum ialah suatu negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang pada umumnya berdasarkan atas kesadaran hukum dalam masyarakat.¹

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari negara hukum adalah dengan menegakkan tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang telah kita ketahui adalah sebagai berikut.

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana yang mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya ialah

¹ Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum*, Surakarta: BP-FKIP UMS, hal. 68, dalam R. Soebekti & Tjitro Sudibjo, 1987, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prsadnya Paramitha, hal. 77

mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.²

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan kerjasama antara penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Belum memuaskannya keadaan penegakan hukum di negara kita ini ironisnya terbentur pada para penegak hukum yang seharusnya memberi contoh teladan kepada masyarakat dalam mentaati hukum serta menegakkan hukum secara murni dan konsekuen.³

Pengadilan berperan dalam proses untuk keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan pengadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Hakim memegang peran penting dalam peradilan karena hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen mengharuskan kekuasaan kehakiman bersifat bebas guna menegakkan hukum dan keadilan. Batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebeb-bebasnya namun dibatasi oleh aturan dan norma.⁴ Sesungguhnya pembatasan itu tidak semata-mata ditentukan oleh undang-undang namun kebebasan hakim juga dibatasi oleh nilai-nilai keadilan dari lubuk hatinya, sehingga hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara pidana tentunya harus bebas dari intervensi dan tekanan, paksaan, bujuk rayu dari siapapun. Pada prinsipnya tujuan kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan

² Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, ,hal. 9

³ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Tindak Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hal. 19

⁴ Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Nusamedia, hal. 218

dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.⁵ Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). KUHAP mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari kesimpulan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam hal putusan bebas, argumentasi penuntut umum maupun penasihat hukum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti sah, memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap suatu hal harus betul-betul meyakinkan. Alat bukti tersebut dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu hal, maka perlu disadari bahwa alat bukti yang diajukan harus menumbuhkan keyakinan dan dapat memantapkan pendirian hakim. Jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan maka hakim wajib membebaskannya,⁶ tetapi jika hakim keliru membebaskan orang yang bersalah maka ia hanya akan berhadapan dengan pertanggungjawaban yuridis karena salah menerapkan hukum.⁷ Hakim selalu dihadapkan pada dua pilihan yang sulit antara keadilan dan kepastian hukum namun dalam putusan harus memuat dan memadukan keduanya. Hal ini sesuai dengan fungsi hakim yang bukan hanya sekedar menjadi corong undang-undang, tetapi hakim wajib

⁵ Dahlan Sinaga, *Op Cit*, hal. 24

⁶ Leden Marpaung, 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 50

⁷ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: PENERBIT ALFABETA, hal. 198

mencari nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum yang progresif dan responsif maka hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan berbagai macam pertimbangan. Penjatuhan putusan bebas hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Bukan tidak mungkin suatu putusan bebas yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah pada penulisan skripsi ini agar lebih mudah untuk dipahami sehingga kajian dapat dilakukan secara lebih terarah, fokus pada sasaran yang akan dikaji, serta menghindari perluasan masalah yang dikarenakan ruang lingkup atau objek penelitian yang meluas, maka penulis meneliti putusan nomor 371/Pid.B/2014/PN.Bta, 258/Pid.B/2014/PN.Pdg, 103/Pid.B/2012/PN.Wkb.

Dalam rumusan masalah ini, memuat uraian inti dari permasalahan yang diteliti dengan bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, dan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pembatasan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan?
- b. Apakah putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?
- c. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan putusan bebas (*vrijspraak*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

a. Tujuan Subyektif

- 1) Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analitis penulis, khususnya dalam Hukum Acara Pidana
- 2) Untuk memperoleh data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar sarjana dalam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

b. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*)
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut dengan hukum yang berlaku

- 3) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk membatalkan putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan
- 2) Memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan
- 3) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum yang kaitannya dengan tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini
- 2) Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis

D. Kerangka Pemikiran



Apabila terjadi tindak pidana pembunuhan, terdapat beberapa tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana umum yakni, pertama penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. Kedua, berupa penuntutan oleh penuntut umum. Pada tahapan ini tugas jaksa penuntut umum adalah untuk membuat surat dakwaan. Ketiga, pemeriksaan di muka sidang Pengadilan Negeri.⁸ Dari proses persidangan tersebut didapat musyawarah akhir majelis hakim yang berupa putusan pemidanaan, pembebasan (*vrijspraak*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) memerlukan kejelian dan kecermatan dalam pertimbangannya. Pertimbangan hakim sangat

⁸ Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 51

diperlukan karena keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat. Putusan hakim yang bebas, dijatuhkan apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tidak benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa tidak bersalah. Jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan maka hakim wajib membebaskannya,⁹ tetapi jika hakim keliru membebaskan orang yang bersalah maka ia hanya akan berhadapan dengan pertanggungjawaban yuridis karena salah menerapkan hukum.¹⁰

Hakim selalu dihadapkan pada dua pilihan yang sulit antara keadilan dan kepastian hukum namun dalam putusan harus memuat dan memadukan keduanya. Setelah putusan bebas dijatuhkan oleh hakim, bukan tidak mungkin suatu putusan bebas yang telah dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga mengabaikan nilai-nilai keadilan karena hakim juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan sehingga ada upaya untuk membatalkan putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹

⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 50

¹⁰ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.Cit*, hal. 198

¹¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

Sementara itu, dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum doktrinal di mana mengambil pendapat para ahli mengenai putusan bebas dan melalui produk hukum berupa peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif¹² yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara tepat tentang tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan penulis menginventaris data berupa putusan bebas pengadilan negeri agar dapat lebih fokus pada rumusan masalah, selain itu penulis berdomisili di Kota Surakarta sehingga dapat memudahkan penulis dalam penelitian.

¹² Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha yang memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam buku Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti terkait dengan putusan bebas diperoleh berupa keterangan-keterangan yang secara langsung dari lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder, yaitu data yang didapat oleh penulis yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer:

a) Putusan nomor 371/Pid.B/2014/PN.Bta, 258/Pid.B/2014/PN.Pdg, dan 103/Pid.B/ 2012/PN.Wkb

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

d) Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

e) Putusan Mahkamah Konstitusi

2) Bahan hukum sekunder:

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang berkaitan dengan putusan hakim.

3) Bahan hukum tersier:

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mencari serta menginventarisasi putusan pengadilan, literatur-literatur, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Metode ini dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, mendalami data tersebut. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Penulis melakukan analisis data secara kualitatif¹³ dengan mengolah data yang telah diinventarisasi kemudian dianalisis dengan prosedur penalaran induktif yang berawal dari hasil pengamatan kemudian berakhir pada suatu kesimpulan.

F. Sistematika penulisan

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran-gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi: latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan diakhiri sistematika penulisan.

¹³ Analisis kualitatif mendasarkan penelitian berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum), dalam buku Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 99

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang materi-materi beserta teori-teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti meliputi: tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum tentang pembuktian dan sistem pembuktian pidana, tinjauan umum tentang putusan pengadilan, tinjauan umum tentang putusan bebas (*vrijspraak*).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi: dasar pertimbangan hakim dalam putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada putusan pertama, kedua dan ketiga, kesesuaian putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana pembunuhan dengan hukum yang berlaku, serta upaya yang dapat membatalkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Bab IV Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari penelitian yang meliputi: kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.